



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA





SESMENKO PADA KEGIATAN PRIME MEETING #1 - 31 JULI 2025



SESMENKO PADA INTERNALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENKO KUMHAM IMIPAS - 3 SEPTEMBER 2025



SESMENKO PADA SOSIALISASI LAYANAN CALL CENTER - 22 OKTOBER 2025



SESMENKO PADA KEGIATAN PRIME MEETING #2 - 9 SEPTEMBER 2025



SESMENKO PADA PENGUATAN PPID DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - 12 NOVEMBER 2025





SESMENKO PADA RAKOR MKKS KEMENKO KUMHAM IMIPAS - 27 NOVEMBER 2025



SESMENKO PADA RAKOR SESPIM POLRI DI LEMBANG - 24 OKTOBER 2025



SESMENKO MENGHADIRI GIAT OECD DI LANGHAM - 12 NOVEMBER 2025



SESMENKO MENGHADIRI ACARA KAMAR DAGANG HAINAN - 12 DESEMBER 2025



SESMENKO PADA REFLEKSI AKHIR TAHUN KEMENIMIPAS - 16 DESEMBER 2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selama tahun 2025. Dokumen ini menyajikan capaian kinerja, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2025, serta kendala yang dihadapi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program-program yang telah terlaksana dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, 1 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

R. Andika Dwi Prasetya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIVE	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Aspek Strategis	7
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Capaian Kinerja Anggaran	33
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sasaran Program Sekretariat Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan	vii
Gambar 2	Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025	viii
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	3
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025	17

DAFTAR TABEL

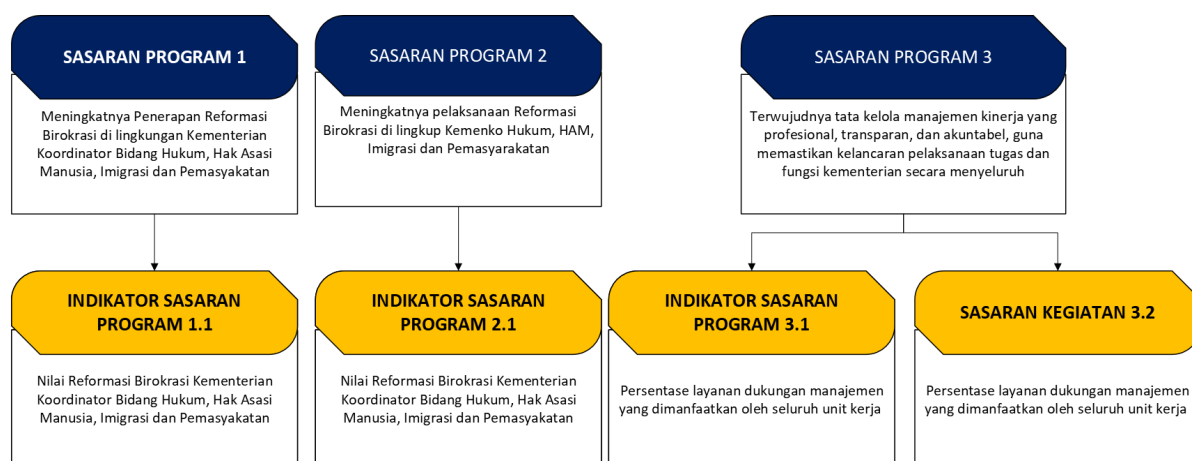
Tabel 1	Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025	vii
Tabel 2.1	Matriks Prioritas Nasional Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kerja Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Capaian Rincian Output Prioritas Nasional K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	20
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.3	Progran/kegiatan menunjang keberhasilan	24
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 2	27
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	33
Tabel 3.7	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran	33
Tabel 3.8	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran	34
Tabel 3.9	Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan	35
Tabel 3.10	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	37
Tabel 3.11	Kinerja Perencanaan Anggaran	37
Tabel 3.12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	37
Tabel 3.13	Identifikasi isu	38
Tabel 4.1	Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2026	43

RINGKASAN EKSEKUTIVE

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penggunaan sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran program (gambar 1) yang dituangkan dalam PK Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Gambar 1 Sasaran Program Sekretariat Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan



Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks	Belum dilakukan penilaian	
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%	Belum terdapat rekomendasi RB	
3.	Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100,00%	99,84%	99,84%
		Nilai SAKIP Kementerian	77 indeks	74,27 indeks	96,45%

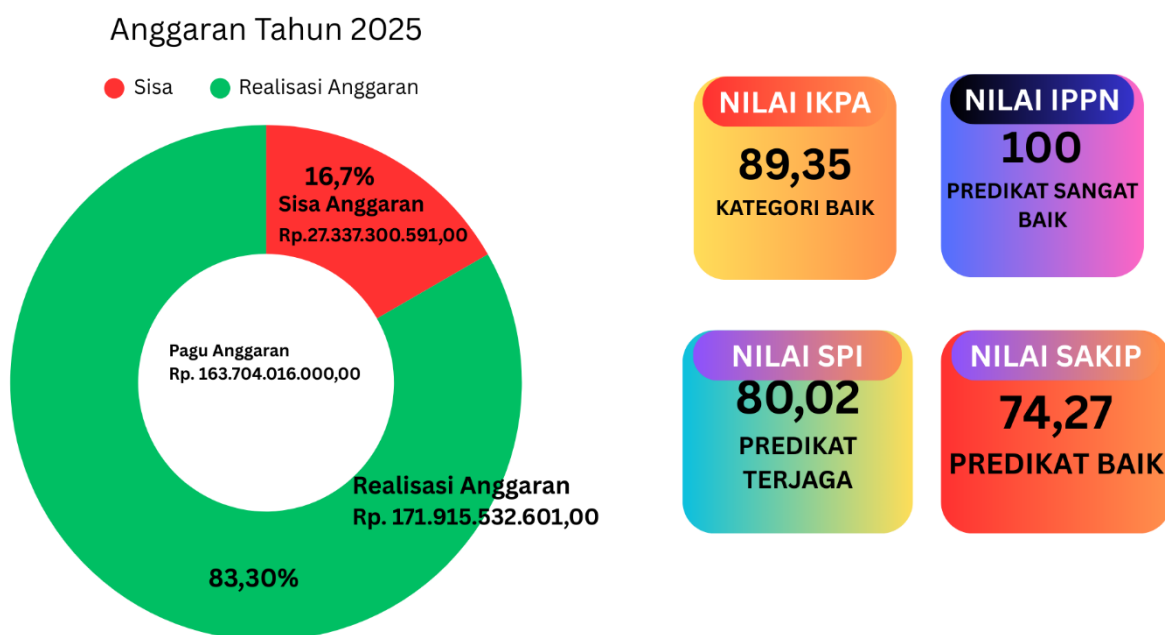
Tabel 1 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025

Penetapan Sasaran Program Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 NOMOR: SP DIPA-130.01-0/2025. Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 163.704.016.000,00

(seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat juta enam belas ribu rupiah). Per tanggal 31 Desember 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 136.366.715.409,00 (seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 83,30%.

Capaian - capaian kinerja anggaran Sekretariat Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tergambarkan pada gambar berikut

Gambar 2 Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan sebesar **89,35 (kategori baik)**, nilai tersebut didapat melalui aplikasi OMSPAN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **100 (predikat sangat baik)** nilai tersebut disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **80,02 (predikat terjaga)**.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Setmenko Kumham Imipas

BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan Sasaran Program yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian Sasaran Program yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan ke depannya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. Koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan , dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dibantu oleh:

- a. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
- b. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- d. Biro Umum dan Keuangan.

Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator



1. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia, koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penyiapan naskah rancangan peraturan, serta advokasi hukum Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi aparatur sipil negara;
- c. perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur sipil negara, manajemen karier, manajemen talenta, dan jabatan fungsional;
- d. koordinasi pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen kinerja aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, kode etik serta kode perilaku aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan pemberian penghargaan aparatur sipil negara;
- f. pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- g. pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- h. pembinaan dan pelaksanaan pembinaan advokasi hukum Kementerian Koordinator;

2. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator;

- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan pengelolaan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator dan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator;
- f. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

3. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Tugas Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, yaitu:

- a. melaksanakan pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita dan informasi, pengelolaan pengaduan, pemantauan dan evaluasi teknologi informasi, serta pengelolaan data dan aplikasi di lingkungan Kementerian Koordinator
- b. tugas dan fungsinya menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- b. pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita, pengelolaan dan penanganan informasi, serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pengelolaan opini publik, relasi media, produksi informasi, dan edukasi publik;
- d. pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan sistem pengelolaan pengaduan;
- e. pelaksanaan manajemen, standardisasi, monitoring dan evaluasi teknologi informasi serta pengelolaan pusat data dan aplikasi;
- f. pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- g. fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

4. Biro Umum dan Keuangan.

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, dan pengelolaan keuangan Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Umum dan Keuangan.

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan, dengan fokus pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah;

4. Mendorong penguatan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Adapun aspek strategis sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis
Proses menyusun arah kebijakan dan program agar sejalan dengan visi, misi, serta prioritas nasional.
2. Pengendalian Strategis
Memastikan rencana yang sudah disusun benar-benar dilaksanakan sesuai target.
3. Dukungan Administrasi dan Kesekretariatan
 - a. Mengelola tata usaha, arsip, dan dokumentasi kebijakan.
 - b. Menyediakan layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas Menteri Koordinator.
4. Pengelolaan Sumber Daya
 - a. Menjamin efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia.
 - b. Mendorong pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan digitalisasi birokrasi
5. Manajemen Informasi dan Data
Menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan strategis
6. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
 - a. Menjalankan prinsip good governance melalui akuntabilitas kinerja.
 - b. Memastikan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi.
7. Transformasi Digital Tata Kelola Hukum
Mewujudkan ekosistem hukum digital terintegrasi nasional melalui integrasi sistem informasi hukum nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

E. Isu Strategis

Isu strategis di bidang Dukungan Manajemen, sebagai berikut:

1. Reformasi Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Penguatan Sumber Daya Manusia

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Penguatan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Penguatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-29.PR.03 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas mengenai laporan kinerja yang disahkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sasaran Strategis, Target Kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi

lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang

Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026.

LAMPIRAN

: Berisi data-data lainnya yang diperlukan



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Setmenko Kumham Imipas

BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang tertuang dalam aplikasi KRISNA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi dan Misi Tahun 2025

Visi:

“Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Guna mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia;**
- 2) **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Tujuan Tahun 2025

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan :

- 1) **Terwujudnya pembangunan hukum berkelanjutan dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia;**
- 2) **Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Sasaran Strategis Tahun 2025

- 1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik;
- 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Sasaran Program Tahun 2025

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rencana Kerja Tahun 2025

Berikut Rencana Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matrik Rencana Kerja Tahun 2025

KODE	RINCIAN OUTPUT	TARGET
7150.EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan	1.0 Laporan
7150.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan
7150.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan
7150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan
7150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan
7150.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan
7150.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan
7150.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan
7150.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan
7150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan
7150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan
7150.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan
7150.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan
7150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan
7150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan
7150.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1798.0 Unit
7150.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	30.0 Orang
7150.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	270.0 Orang
7150.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja	1.0 Dokumen
7150.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja	1.0 Dokumen

KODE	RINCIAN OUTPUT	TARGET
7150.EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.0 Dokumen
7150.EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.0 Dokumen
7150.EBD.003	Layanan Kerja Sama	1.0 Layanan
7150.EBD.003	Layanan Kerja Sama	1.0 Layanan
7150.EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian	1.0 Dokumen
7150.EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1.0 Dokumen
7150.EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian	1.0 Laporan
7150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen
7150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen
7150.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen
7150.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen
7150.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.0 Laporan
7150.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.0 Laporan
7150.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Laporan
7150.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Laporan

Rencana Strategis Tahun 2026 - 2029

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029 mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun 2026.

Visi dan Misi Tahun 2026 - 2029

Visi:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Tujuan Tahun 2026 - 2029

- 1) Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 2) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sasaran Strategis Tahun 2026 - 2029

- 1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik
- 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Sasaran Program Tahun 2026 - 2029

Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imipis tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor: SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

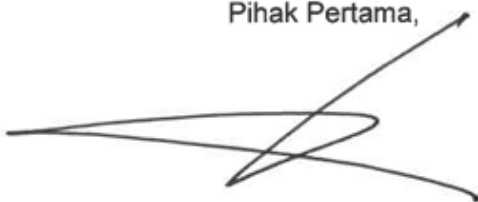
Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,



Yusril Ihza Mahendra

Pihak Pertama,



R. Andika Dwi Prasetya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayakatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayakatan	85 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasayakatan	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%
3.	Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100 %
		Nilai SAKIP Kementerian	77

PROGRAM	Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator



R. Andika Dwi Prasetya



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Setmenko Kumham Imipas

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran program yang dituangkan dalam PK Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indikator Kinerja Sasaran Program 1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan .

Target Kinerja Sasaran Program 1: 85 Indeks

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula:

Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pelaksanaan penilaian nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan belum disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai dengan Laporan Kinerja ini selesai disusun, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkaatan belum mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka capaian pada Indikator Kinerja dimaksud belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Program 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	Indeks	-	-	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Analisis penyebab keberhasilan

Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini juga menjadi momen penting dengan peluncuran website resmi kementerian, yang diadakan pada Jumat (10/01/2025);
- Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - 1) Melakukan Revisi Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - 2) Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SES-15.OT.02.02 Tanggal 11 Februari Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pola Kerja Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, melakukan Pemanggilan ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2025;
- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor MKH-261.PR.01.01 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029;
- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi MANusi, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai 80,02 (predikat terjaga);
- Terlaksanakannya Perencanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Pengelolaan pemberitaan baik di website internal dan media massa;
- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Pembangunan sistem pusat kontak dan pengaduan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sasaran Program 2: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2: Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian.

Target Kinerja Sasaran Program 2: 100%

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.

Formulasi Perhitungan:

% rekomendasi tindak lanjut Reformasi Birokrasi = (rekomendasi tindak lanjut Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yang dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut) x 100%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi belum melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Assasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sehingga belum ada rekomendasi reformasi birokrasi perlu dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Assasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. ehubungan dengan hal tersebut, maka capaian pada Indikator Kinerja dimaksud belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025:

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Program 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100	%	-	-	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Analisis penyebab keberhasilan

Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini juga menjadi momen penting dengan peluncuran website resmi kementerian, yang diadakan pada Jumat (10/01/2025);
- Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - 1) Melakukan Revisi Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - 2) Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SES-15.OT.02.02 Tanggal 11 Februari Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pola Kerja Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, melakukan Pemanggilan ASN di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2025;

- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor MKH-261.PR.01.01 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasarakatan;
- Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029;
- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi MANusi, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan dengan nilai 80,02 (predikat terjaga);
- Terlaksanakannya Perencanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- Pengelolaan pemberitaan baik di website internal dan media massa;
- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
- Pembangunan sistem pusat kontak dan pengaduan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sasaran Program 3: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1: Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja.

Target Kinerja Sasaran Program 3.1: 100%

Indikator ini merepresentasikan keberhasilan layanan-layanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, layanan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Layanan di lingkungan Sekretariat Kemkenterian Koordinator

KODE	RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
7150.EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
7150.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.959	Layanan Protokol	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.959	Layanan Protokol	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1798.0 Unit	1698.0 Unit	94,44%
7150.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	30.0 Orang	30.0 Orang	100,00%
7150.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	270.0 Orang	270.0 Orang	100,00%
7150.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.003	Layanan Kerja Sama	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%
7150.EBD.003	Layanan Kerja Sama	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100,00%

7150.EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
7150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100,00%
7150.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
7150.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
7150.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
7150.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Laporan	1.0 Laporan	100,00%
Persentase Realisasi				99,84%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{99,84\%}{100,00\%} \times 100\% = 99,84\%$$

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Indikator Sasaran Program 3.1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100	%	99,84%	99,84%	Capaian tidak mencapai target

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi Kinerja tidak dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi Kinerja tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

- Manajemen Kepemimpinan: Kepemimpinan yang efektif dalam memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan;
- Kerja Sama Tim (Teamwork): Komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan kolaborasi antar pegawai;
- Evaluasi Rutin: Melakukan peninjauan kinerja/monitoring kinerja secara berkala (Triwulan) untuk memantau progres dan memperbaiki kesalahan lebih cepat.

Penyebab kegagalan antara lain:

- Penggunaan anggaran yang bersala dari SP SABA Bendahara Umum Negara memiliki keterbatasan dalam melakukan penyesuaian/revisi sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi;
- Kurangnya ketelitian dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun sehingga terdapat beberapa pelaksanaan belanja modal yang menjadi tunggakan untuk Tahun 2026.

Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2: Nilai SAKIP Kementerian

Target Kinerja Sasaran Program 3.2: 77 Indeks

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Kementerian/Lkembaga dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, implementasi SAKIP diukur berdasarkan 4 (empat) komponen dimana masing-masing komponen ditentukan oleh 3 (tiga) subkomponen dengan bobot yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Komponen Penilaian SAKIP

	KEBERADAAN	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL
PERENCANAAN KINERJA	6%	9%	15%	30%
PENGUKURAN KINERJA	6%	9%	15%	30%
PELAPORAN KINERJA	3%	4,5%	7,5%	15%
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	5%	7,5%	12,5%	25%
NILAI AKIP	20%	30%	50%	100%

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/59/AA.05/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menunjukkan nilai **74,27 dengan predikat “BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berkenaan dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Sehingga berdasarkan Persentase Pencapaian target dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Target: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Target: } \frac{74,27 \text{ Indeks}}{77 \text{ Indeks}} \times 100\% = 96,45\%$$

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Indikator Sasaran Program 3.2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Nilai SAKIP Kementerian	77	Indeks	74,27	96,45%	Capaian tidak mencapai target

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarkatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarkatan:

Tabel 3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	Target	Capaian			
Nilai SAKIP Kementerian	77,00	74,27	75,58	77,88	79,00

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB awal 2026 (data 2025), rata-rata nilai SAKIP nasional Kementerian/Lembaga mencapai 73,61 dengan predikat “BB”, berkenaan dengan nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarkatan yaitu 74,27 dapat dibandingkan bahwa capain nilai SAKIP telah melebihi rata-rata nilai SAKIP Kementerian/Lembaga.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dalam rangka implemntasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarkatan, telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - 1) Melakukan Revisi Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemsayarakatan;
 - 2) Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SES-15.OT.02.02 Tanggal 11 Februari Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pola Kerja Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan.
- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasayarkatan, melakukan Pemanggilan ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayarakatan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2025;
- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasayarkatan Nomor MKH-261.PR.01.01 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasayarakatan;
- Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan Tahun 2025 – 2029;

Berdasarkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/59/AA.05/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a) Menyusun Pedoman teknis perencanaan kinerja yang mengacu pada Permenpan 53 Tahun 2014 sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja;
 - b) Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada seluruh level organisasi dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil,

sesuai dengan mandat dan fungsi organisasi, serta relevan dalam menjawab isu-isu strategis utama yang harus diselesaikan;

- c) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- d) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- e) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari unit kerja lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- f) Menyampaikan rencana aksi Instansi Pemerintah dan unit kerja pada esr.menpan.go.id;

2. Pengukuran Kinerja

- a) Menyusun Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang mengacu pada Permenpan 53 Tahun 2014 sebagai acuan dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran organisasi;
- b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja instansi dan unit kerja secara berkala dan mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- c) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward and punishment, perubahan strategi dan target kinerja untuk lingkup unit kerja;
- d) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan unit kerja;
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-SAKIP untuk memastikan pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi hingga individu dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan), serta mendorong kepatuhan seluruh unit kerja dalam melakukan pengisian data kinerja, khususnya realisasi rencana aksi, secara tepat waktu;

3. Pelaporan Kinerja

- a) Menyusun Laporan Kinerja tahun 2025 Instansi dan Unit kerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta

menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- b) Menyampaikan laporan kinerja dalam laman resmi Kemenko Kumham Imipas sebagai bagian transparansi kepada publik;
- c) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menyusun pedoman evaluasi internal akuntabilitas kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 sebagai panduan dalam melakukan evaluasi;
- b) Melaksanakan evaluasi internal kepada unit kerja dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap unit kerja;
- c) Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level unit kerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pencapaian target indikator kinerja dimaksud, realisasi anggaran sebesar Rp. 136.366.715.409,00 (83,30%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 163.704.016.000,00. Sementara itu, persentase capaian target kinerja pada indikator dimaksud belum dapat dihitung karena penilaian masih dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang pencapaian target kinerja dimaksud.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program didukung oleh 254 pegawai, dengan tingkat produktivitas yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mendukung pencapaian target Kementerian Koordinator telah melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- Layanan BMN
- Layanan Protokoler
- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Data dan Informasi
- Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Manajemen SDM
- Layanan Manajemen Kinerja
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
- Layanan Kerja Sama
- Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian
- Layanan Reformasi Kinerja
- Layanan Audit Internal
- Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta

B. Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Per tanggal 31 Desember 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 163.704.016.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 83,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM /KEGIATAN		
Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	PAGU ANGGARAN (Rp.)	163.704.016.000,00
	REALISASI (Rp.)	136.366.715.409,00
	PERSENTASE(%)	83,30%

Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

PROGRAM /KEGIATAN	Pagu	Realisasi		Persentase
Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	163.704.016.000,00	Triwulan I	997.358.230,00	0,61%
		Triwulan II	19.603.553.014,00	11,97%
		Triwulan III	53.258.986.193,00	32,53%
		Triwulan IV	62.506.817.972,00	38,18%
		Total Realisasi	136.366.715.409,00	83,30%

2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja

Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam mencapai target melalui 1 Program . Berikut tabel hubungan capaian kinerja dengan anggaran.

Tabel 3.7 Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Program: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program 1: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan					Rp.163.704.016.000,00	Rp.136.366.715.409,00 (83,3%)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks	-	-		
Sasaran Program 2: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan						
1	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%	-	-		

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Sasaran Program 3: Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh						
1	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100,00%	99,84%	99,84%		
2	Nilai SAKIP Kementerian	77 Indeks	74,27 indeks	96,45%		

3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

a. Analisis Efektivitas

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan **sangat efektif**. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja dengan rata-rata capaian mencapai 98,15%

b. Analisis Efisiensi

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan **sangat efisien**. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang mencapai 83,30%

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA digunakan untuk mengevaluasi aspek perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran.

Nilai IKPA dipantau secara periodik melalui aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk mengetahui kinerja satuan kerja. Berikut hasil penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan:

Tabel 3.9 Penilaian IKPA Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	-

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
2	Deviasi Halaman III DIPA	74,69	15	11,20	Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang sudah ditetapkan.
3	Penyerapan Anggaran	74,24	20	14,85	Penyerapan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan
4	Belanja Kontraktual	92,67	10	9,27	Penyelesaian kontrak yang tidak sesuai dengan jadwal (melewati batas waktu)
5	Penyelesaian Tagihan	98,26	10	9,83	Terdapat penyelesaian tagihan yang tidak terbayarkan di TA 2025 sejumlah 1 tagihan
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,81	10	9,98	Terdapat persentase Revolving UP yang persentasenya rendah di akhir tahun
7	Capaian Output	99,90	25	24,97	Terdapat Belanja yang tidak mencapai target, yaitu Belanja Modal. Target Belanja Modal sejumlah 1.798 unit, sedangkan realisasi sejumlah 1.698 unit
8	Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)			(0,75)	Terdapat 1 SPM yang melebihi batas waktu karena penolakan dari KPPN.

Nilai Akhir IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah **89,35 berkategori baik**.

5. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah skor atau ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Instrumen utamanya, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 untuk menilai kualitas perencanaan anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama yaitu efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas sebesar 75% dari capaian Realisasi Output (RO) dan 25% Efisiensi dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Berikut Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025:

Tabel 3.10 Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No.	Periode	Kode ES1	Nama ES1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Desember	13001	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	87.35	91.24	99.9	90,10	100%	0.75	89.35

Tabel 3.11 Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	96.17	94.12	99.85	80	100

Tabel 3.12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

No	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	130.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	96,17	89,35	92,76

Nilai Kinerja Anggaran diatas sebesar 92,76 menunjukkan kinerja anggaran **Sangat Baik**.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya termasuk Prioritas Nasional adalah capaian kinerja yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau penugasan yang mendukung agenda Prioritas Nasional namun tidak seluruhnya tercantum dalam indikator kinerja utama atau Perjanjian Kinerja serta penugasan tambahan yang merupakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

1. Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ditunjuk sebagai ketua Komite TPPU yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan TPPU.

Sebagai ketua Komite TPPU yang pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Pada tahun pertama telah berhasil memimpin pelaksanaan pilot survei 2025 sebagai persiapan Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029. Hasil survei dimaksud instrumen pengukuran kinerja APUPPT pada Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2025 dengan skor 6,42 (kategori "cukup").

- Sinergi Komite TPPU: Sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan kolaborasi maksimal untuk memberantas judol, baik domestik maupun luar negeri yang berdampak ke Indonesia.
- Efek Jera & Nilai Moral: Tindakan tegas ini menargetkan bandar dan pemain untuk menghentikan peredaran uang judi, sekaligus menegaskan judol bertentangan dengan norma agama dan sosial.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Setmenko Kumham Imipas

BAB IV

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Polhukam selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran program Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan ke depannya.

Tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan memiliki 3 Sasaran Program dan 4 Indikator Kinerja Sasaran Program. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang capaiannya melebihi target yaitu: *Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional* dengan target 85 %, realisasi target 91,30% sehingga persentase capaian kinerja menjadi 107,41%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan* dimana indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan

Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2026 kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
Program: Dukungan Manajemen				
1	Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	Indeks

B. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Untuk memperkuat fungsi sinkronisasi dan koordinasi perlu dilakukan penyusunan terhadap pola sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigasi, dan Pemasyarakatan;
3. Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu disusun pedoman Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan; dan
5. Menetapkan kebijakan terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Setmenko Kumham Imipas

Lampiran

LAMPIRAN

Rencana Strategis

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
A. TAHUN 2025															
CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan										45.420					
SS 1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	
IKSS 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional		85					Persen							
SP 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif														
IKP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional		85					Persen							
7151 Koordinasi Bidang Hukum										15.431					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum yang Efektif														

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.978.579					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual		1					Rekomendasi Kebijakan	2.975.443					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.335					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.993.803					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi		1					Rekomendasi Kebijakan	2.977.483					
PDB	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
PDB.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	500.000					
7152 Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia									14.984					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	3.007.867					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
7153 Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan									15.005					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan Yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
CL Program Dukungan Manajemen									163.704					
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
SP 1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKP 1.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
7150 Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator									163.704					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKK 1.1	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian		85					Persen						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan		1					Laporan	1.124.599					
EBA.956	Layanan BMN		12					Layanan	272.560					
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1					Layanan	391.374					
EBA.959	Layanan Protokoler		12					Layanan	2.193.611					
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1					Layanan	342.916					
EBA.962	Layanan Umum		12					Layanan	14.195.158					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi		2					Layanan	162.610					
EBA.994	Layanan Perkantoran		1					Layanan	92.277.264					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1496					Unit	49.257.412					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		100					Orang	283.538					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001	Layanan manajemen kinerja		1					Dokumen	115.885					
EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian		1					Dokumen	102.057					
EBD.003	Layanan Kerja Sama		2					Layanan	1.011.470					
EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian		1					Dokumen	721.292					
EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta		1					Dokumen	2.700					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian		1					Laporan	299.357					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2					Dokumen	205.716					
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		3					Dokumen	202.103					
EBD.965	Layanan Audit Internal		4					Laporan	429.069					
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1					Laporan	113.325					

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,

Yusril Ihza Mahendra

Pihak Pertama,

R. Andika Dwi Prasetya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%
3.	Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100 %
		Nilai SAKIP Kementerian	77

PROGRAM	Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator



R. Andika Dwi Prasetya

DESKRIPSI PERJANJIAN KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Program 1: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	
Indikator Kinerja 1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Target	85 indeks
Definisi	Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10) Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

	Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10) Dimana, • Nilai RB General Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100. • ilai RB Tematik + Nilai Aspek Reform (30%) Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100
Sasaran Program 2: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	
Indikator Kinerja 1	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Target	100%
Definisi	Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	% rekomendasi tindak lanjut RB = (rekomendasi tindak lanjut RB Kemenko KUMHAM IMIPAS yang dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut) x 100%
Sasaran Program 3: Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	
Indikator Kinerja 1	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja
Target	100%

Definisi	Indikator ini merepresentasikan tingkat keberhasilan layanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Sumber Data	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Cara Menghitung	$\% \text{ layanan Sekretariat Kemenko yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja} = (\text{rekomendasi tindak lanjut RB Kemenko KUMHAM IMIPAS yang dilaksanakan} / \text{total layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan}) \times 100\%$
Indikator Kinerja 2	Nilai SAKIP Kementerian
Target	77 Indeks
Definis	Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Kementerian/Lkembaga dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian SAKIP dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, implementasi SAKIP diukur berdasarkan 4 (empat) komponen dimana masing-masing komponen ditentukan oleh 3 (tiga) subkomponen dengan bobot yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

	KEBERADAAN			KUALITAS		PEMANFAATAN	
	PERENCANAAN KINERJA	6%	9%	15%			
	PENGUKURAN KINERJA	6%	9%	15%			
	PELAPORAN KINERJA	3%	4,5%	7,5%			
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	5%	7,5%	12,5%			
	NILAI AKIP	20%	30%	50%			
Sumber Data	Kemenpan RB						
Cara Menghitung	Ambil data hasil penilaian Menpan RB terhadap evaluasi AKIP Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan						

RENCANA KERJA TAHUNAN TA 2025

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- 2. VISI** : Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
- 3. MISI** :
 1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi P5 HAM
 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan HAM

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
	Total	0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik		6.552.224,0
01.01	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	
02	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien		2.477.303,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	

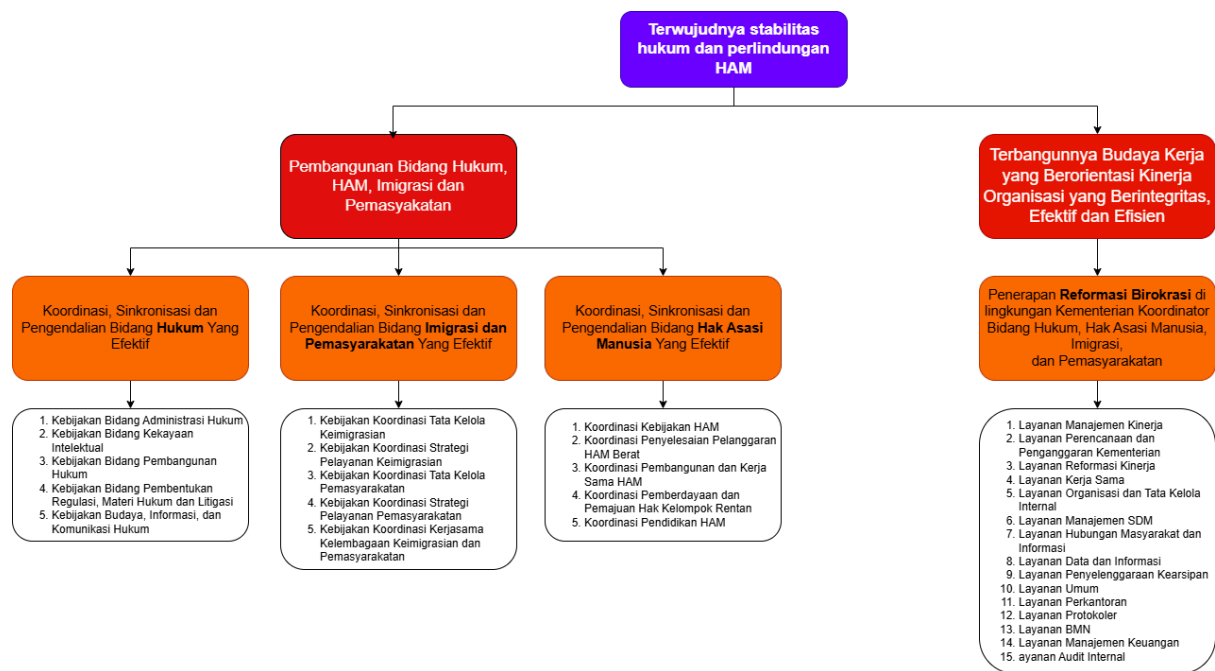
KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total			9.029.527,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
130.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	6.552.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.552.224,0	6.854.825,0	7.157.000,0	7.465.000,0
130.WA	Program Dukungan Manajemen	2.477.303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.477.303,0	2.581.000,0	2.693.000,0	2.810.000,0
Total		9.029.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.029.527,0	9.435.825,0	9.850.000,0	10.275.000,0

Jakarta, 11 Agustus 2025

POHON KINERJA TAHUN 2025





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**



kumham.imipas



kumham.imipas



kumham_imipas



Kemenko Kumhamimipas



Kemenko Kumham Imipas RI



www.kumham-imipas.go.id



humas@kumham-imipas.go.id



**Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940**